

INDEKS

PEMBANGUNAN

MANUSIA

KABUPATEN LEBONG



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LEBONG

INDEKS

PEMBANGUNAN

MANUSIA

KABUPATEN LEBONG



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

KABUPATEN LEBONG

2021

Katalog BPS : 4102002.1707
Nomor Publikasi : 17070.2211
Ukuran Buku : 21,59 cm x 27,94 cm
Jumlah Halaman : viii + 51 halaman

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Yuniarto, SST, M.Si
Penyunting : Bobby Fernando, S.ST
Penulis Utama : Ferry Bailovan, S.E
Gambar Kulit : Ferry Bailovan, S.E
Diterbitkan Oleh : © BPS Kabupaten Lebong

Boleh Dikutip Dengan Menyebut Sumber

KATA PENGANTAR

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan yang layak, dan masing-masing dimensi direpresentasikan oleh indikator. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup, dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lamanya sekolah, serta dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penyajian angka IPM menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi maupun disparitas antar daerah. Dengan ini, maka diharapkan agar daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Semoga publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebong 2021 bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan.

Tubei, November 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Lebong



Yuniarto, S.ST., M.Si

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Sistematika Penyajian.....	6
BAB 2 METODOLOGI.....	8
2.1 Indikator.....	8
2.2 Metode Penghitungan.....	9
2.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	12
2.4 Klasifikasi/Pengelompokan Indeks Pembangunan Manusia.....	20
2.5 Sumber Data IPM.....	21
BAB 3 GAMBARAN UMUM KABUPATEN LEBONG.....	22
3.1 Keadaan Geografis.....	22
3.2 Penduduk.....	234
3.3 Kesehatan.....	24

3.4 Pendidikan	30
3.5 Potensi Ekonomi	344
BAB 4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN LEBONG	37
4.1 Indeks Harapan Hidup	38
4.2 Indeks Pendidikan	39
4.3 Indeks Daya Beli	41
4.4 Indeks Pembangunan Manusia	43
4.5 Perbandingan IPM Antar Kabupaten/Kota	45
BAB 5 PENUTUP	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Implikasi Kebijakan	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Nilai Maksimum, Nilai Minimum dan Range Pencapaian	14
Tabel 2. Persentase penduduk berumur 15 tahun keatas menurut Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki,2021.....	20
Tabel 3. Persentase Sumber Air Utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi, mencuci dal lain-lain di Kabuapten Lebong, 2021.....	24
Tabel 4. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang diterima Kabupaten Lebong, 2021.....	25
Tabel 5. Persentase Pembuangan Akhir Tinja yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Lebong, 2021	26
Tabel 6. Persentase Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Lebong, 2021	29
Tabel 7. Persentase Kepala Rumah tangga Menurut Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Lebong, 2021	30
Tabel 8. Persentase Kemampuan Membaca dan Menulis Kab. Lebong Tahun 2021	33
Tabel 9. Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Lebong 2021	33

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Lebong	23
Gambar 2. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kab. Lebong Tahun 2021.....	26
Gambar 3. Jumlah Sekolah di Kab. Lebong Tahun 2021	31
Gambar 4. Jumlah Tenaga Pengajar di Kab. Lebong Tahun 2021.....	322
Gambar 5. PDRB Kab. Lebong Tahun 2017-2021.....	36
Gambar 6. Umur Harapan Hidup Kab. Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2021	39
Gambar 7. Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2021	40
Gambar 8. Rata-Rata Lama Sekolah di Kab. Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2021	41
Gambar 9. Pengeluaran per kapita Kab. Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2021	42
Gambar 10. Pengeluaran per Kapita Kab/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2021.....	43
Gambar 11. IPM Kab. Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2021	44

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya dapat diukur melalui keberhasilan pembangunan fisik, melainkan juga pencapaian pembangunan non fisik. Jika keberhasilan pembangunan fisik bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan perkapita, maka pembangunan non fisik lebih menekankan pada aspek pembangunan manusia. Dalam menghadapi era globalisasi yang tengah memasuki pasar bebas, sangat diperlukan sumber daya manusia yang mampu bersaing ketat di dalam era pasar bebas ini. Untuk itu, pemerintah perlu lebih memfokuskan pada pembangunan yang terpusat pada sumber daya manusia.

Seiring dengan berjalannya waktu, tampak bahwa ada pergeseran paradigma pembangunan di dunia. Pergeseran paradigma ini bertolak dari adanya fakta bahwa pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dilihat dari perubahan konsep di dunia, pada awal dekade 70-an banyak pendapat mengemukakan bahwa pertumbuhan produksi merupakan syarat bagi kesejahteraan masyarakat, namun hasil yang dicapai belum maksimal. Pada dekade itu juga ditekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution-growth development*). Selanjutnya pada awal dekade 80-an muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need development*), dan akhir-akhir ini sejak tahun 90-an paradigma pembangunan terpusat pada aspek manusia (*human centered*

development).

Dalam konteks tersebut, UNDP (*United Nations Development Programme*) menganggap bahwa pembangunan manusia dapat dilihat sebagai proses upaya agar penduduk memperoleh “perluasan pikiran” dan sekaligus sebagai taraf kehidupan yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan keterampilan, sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan/keterampilan tersebut. Konsep pembangunan manusia ini mempunyai pengertian yang lebih luas dibanding konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan, kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, atau pembangunan sumber daya manusia.

Manusia merupakan subyek dan sekaligus obyek dari pembangunan. Sebagai subjek dari pembangunan artinya manusia sebagai pelaku dari perjalanan roda pembangunan di suatu daerah. Sedangkan manusia sebagai objek dari pembangunan artinya manusia menjadi faktor yang dituju dari beberapa pembangunan yang ada untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan upaya untuk meningkatkan kehidupan yang lebih layak bagi penduduk di suatu daerah, yaitu melalui perencanaan program-program pembangunan daerah.

Sebagaimana dinyatakan dalam *Human Development Report (HDR)* pertama yang dipublikasikan oleh UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Di antara pilihan tersebut, pilihan terpenting adalah untuk berumur panjang, sehat, berilmu

pengetahuan dan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar hidup secara layak.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan berbagai aspek meliputi produksi, distribusi komoditas, peningkatan kemampuan manusia dan secara bersamaan mengakomodir berbagai isu di masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, perdagangan, kebebasan berpolitik, serta isu gender ataupun nilai-nilai kultural. Menurut HDR, ada empat komponen penting dalam paradigma pembangunan manusia, yaitu produktifitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*). Dalam pelaksanaannya, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan terhadap hasil pembangunan manusia diperlukan suatu ukuran tertentu. Ukuran atau indikator tersebut harus bersifat angka tunggal (indikator komposit) yang dapat menggambarkan berbagai indikator tertentu.

Sejak tahun 1990, UNDP telah menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah. Indeks tersebut merupakan angka agregat yang dapat diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh (*shortfall*) suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimum 100. Pengukuran IPM difokuskan pada tiga dimensi yang dianggap esensial bagi kehidupan manusia yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living standards*).

UNDP merekomendasikan bahwa tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara secara minimal direfleksikan dengan tingkat pemenuhan tiga unsur,

yaitu peluang berumur panjang dan sehat, berpengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk mendayagunakan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan produktif. Berdasarkan tiga unsur tersebut, maka diperoleh indikator-indikator berupa angka harapan hidup (*life expectancy at age 0*) yang mengukur tingkat kesehatan masyarakat, angka melek huruf dewasa (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) untuk mengukur tingkat pendidikan dan keterampilan, serta *purchasing power parity* yang merupakan ukuran pendapatan yang disesuaikan dengan paritas daya beli untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. IPM itu sendiri merupakan indeks komposit dari ketiga indikator di atas.

1.2 Maksud dan Tujuan

Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk harus selalu dievaluasi menggunakan berbagai indikator. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu kajian analisis kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk. Oleh karena itu, maksud dan tujuan pengukuran IPM Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:

1. Mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
2. Sebagai salah satu alat ukur kinerja suatu daerah, terutama dalam hal evaluasi proses pembangunan sumber daya manusia.

3. Sebagai alat untuk mempersiapkan kemajuan pembangunan antar kabupaten di suatu wilayah tertentu.
4. Sebagai *input* dan *output* terhadap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan.
5. Sebagai salah satu indikator dalam penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU).
6. Sebagai bahan acuan bagi para peneliti, cendekiawan, pelaku ekonomi dan konsumen data dalam pelaksanaan riset maupun sumber pustaka.
7. Sebagai bahan kajian yang bersifat analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk.
8. Ketersediaan berbagai indikator pembangunan manusia yang berguna dalam pelaksanaan evaluasi dan perencanaan pembangunan yang berjarak dengan indikator pertumbuhan ekonomi daerah.
9. Sebagai acuan penajaman prioritas pembangunan. Artinya, perubahan pola penganggaran pembangunan yang selama ini menggunakan aturan kesepakatan dari pihak penentu ke pola pembangunan yang lebih memihak orang banyak. Dengan demikian, kegiatan pembangunan lebih diarahkan pada aspek efisiensi dan efektivitas anggaran.

1.3 Ruang Lingkup

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan IPM ini sebagian besar bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang pelaksanaan pengumpulan datanya memakai metode sampling dengan jumlah sampel yang relatif terbatas, sehingga akurasi dari indikator-indikator yang dihasilkan akan

sangat tergantung dari seberapa besar sampling maupun nonsampling error yang terkandung didalamnya.

1.4 Sistematika Penyajian

Penyajian buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebong 2022 ini terbagi ke dalam empat bab sebagai berikut :

Bab 1. Pendahuluan, menyajikan :

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Ruang lingkup
- 1.4. Sistematika penyajian

Bab 2. Metodologi, menyajikan :

- 2.1. Indikator
- 2.2. Metode Penghitungan
- 2.3. Komponen IPM
- 2.4. Klasifikasi/Pengelompokan IPM
- 2.5. Sumber Data IPM

Bab 3. Gambaran Umum Kabupaten Lebong, menyajikan :

- 3.1. Keadaan Geografis
- 3.2. Penduduk
- 3.3. Kesehatan
- 3.4. Pendidikan
- 3.5. Potensi Ekonomi

Bab 4. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lebong

4.1. Indeks Harapan Hidup

4.2. Indeks Pendidikan

4.3. Indeks Daya Beli

4.4 Indeks Pembangunan Manusia

4.5. Perbandingan IPM antar Kabupaten/Kota

Bab 5. Penutup

5.1. Kesimpulan

5.2. Implikasi Kebijakan

<https://lebongkab.bps.go.id>

BAB 2

METODOLOGI

2.1 Indikator

Indikator merupakan petunjuk yang memberikan indikasi tentang suatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut. Dalam definisi lain, indikator dapat dikatakan sebagai variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung. Indikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan lain :

1. Sahih (valid), indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya akan diukur oleh indikator tersebut.
2. Objektif, untuk hal yang sama indikator harus memberikan hasil yang sama pula, walaupun dipakai oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda.
3. Sensitif, perubahan yang kecil mampu terdeteksi oleh indikator.
4. Spesifik, indikator hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud, namun demikian perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-benar dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat.

Indikator bisa bersifat tunggal (indikator tunggal) yang isinya terdiri dari satu indikator, seperti Angka Kematian Bayi (AKB), dan bersifat jamak (indikator komposit) yang merupakan gabungan dari beberapa indikator, seperti Indeks Mutu Hidup (IMH) yang merupakan gabungan dari tiga jenis indikator yaitu Angka Melek

Huruf (AMH), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup dari anak usia satu tahun (AHH_{e1}).

Menurut jenisnya indikator dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Indikator input, yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti rasio murid-guru, rasio murid-kelas, rasio penduduk-dokter, rasio penduduk-puskesmas dan lain sebagainya.
2. Indikator proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti : Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-rata Jumlah Jam Kerja, Rata-rata Jumlah Kunjungan ke Puskesmas, Persentase Proses Kelahiran yang Ditolong oleh Dukun.
3. Indikator *Output/Outcome*, yang menggambarkan bagaimana hasil (*output*) dari suatu program kegiatan telah berjalan, seperti : persentase penduduk dengan pendidikan SMU/setara ke atas, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH) dan lain-lain.

2.2 Metode Penghitungan

Pada tahun 2010, *United Nations Development Programme* (UNDP) melakukan perubahan drastis metodologi penghitungan IPM, hingga menyebutnya sebagai metode baru. Variable dalam penghitungan IPM metode baru adalah :

1. Angka Harapan Hidup saat Lahir – AHH (*Life Expectancy-e0*)

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak

lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari proyeksi SP2010.

2. Rata-rata lama Sekolah – RLS (*Mean Years of Schooling-MYS*)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun keatas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun diatas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

3. Harapan Lama Sekolah-HLS (*Expected Years of Schooling-EYS*)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren adalah dari Direktorat Pendidikan Islam.

Formula Penghitungan Harapan lama Sekolah :

$$HLSa^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{Ei^t}{Pi^t}$$

Keterangan:

$HLSa^t$ = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

Ei^t = Jumlah Penduduk Usia i yang bersekolah pada tahun t

i = Usia ($a, a+1, \dots, n$)

FK = Faktor koreksi Pesantren

Faktor Koreksi Pesantren

$$\text{Rasio Santri Mukim} = \frac{\text{Jumlah Bermukim}}{\text{Jumlah Santri Seluruhnya}}$$

Jumlah Santri Sekolah dan Mukim = Rasio Santri Mukim X Jumlah santri Sekolah

$$\text{Faktor Koreksi} = \frac{\text{Jumlah Santri Sekolah dan Mukim}}{\text{Jumlah Penduduk umur 7 tahun keatas}}$$

4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per Kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan Paritas daya beli. Perhitungan paritas daya beli metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan menggunakan Metode Rao.

Penghitungan Paritas Daya Beli

Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung PPP. Pada metode baru, terpilih 96 komoditas dalam penghitungan PPP.

Rumus Penghitungan Paritas Daya Beli (PPP)

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left[\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right]^{1/m}$$

P_{ij} = Harga Komoditas I di Kab/Kota j

P_{ik} = harga Komoditas I di Jakarta Selatan

M = Jumlah Komoditas

Beberapa tahapan Penghitungan IPM dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Tahap Pertama** adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Pengeluaran)

Dimensi Kesehatan

$$I \text{ Kesehatan} = \frac{UHH - UHH \text{ min}}{UHH \text{ maks} - UHH \text{ min}}$$

Dimana :

UHH = Umur Harapan Hidup saat lahir

UHH maks = Nilai Maksimum UHH

UHH min = Nilai Minimum UHH

Dimensi Pendidikan

$$I \text{ Pengetahuan} = \frac{I \text{ HLS} - I \text{ RLS}}{2}$$

Keterangan HLS dan RLS dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS \text{ min}}{HLS \text{ maks} - HLS \text{ min}}$$

Dimana :

I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah

HLS = Harapan Lama Sekolah

HLS maks = Nilai Maksimum Harapan Lama Sekolah

HLS min = Nilai Minimum Harapan Lama Sekolah

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS \min}{RLS \max - RLS \min}$$

Dimana :

I_{RLS} = Indeks Rata-rata Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

RLS maks = Nilai Maksimum Rata-rata Lama Sekolah

RLS min = Nilai Minimum Rata-rata Lama Sekolah

Dimensi Standar Hidup Layak (Pengeluaran)

$$I \text{ Pengeluaran} = \frac{\ln(\text{Pengeluaran}) - \ln(\text{Pengeluaranmin})}{\ln(\text{Pengeluaran maks}) - \ln(\text{Pengeluaran min})}$$

Keterangan :

Indeks Pendapatan diproksi dengan Pengeluaran Per kapita yang telah disesuaikan. In adalah logaritma natural.

- **Tahap Kedua**, dengan menghitung rata-rata geometrik dari Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran dengan Rumus :

$$IPM = \sqrt[3]{I \text{ AHH} \times I \text{ Pendidikan} \times I \text{ Pengeluaran} \times 100}$$

Penentuan nilai maksimum dan minimum dari seluruh dimensi pembentuk IPM menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah seperti yang terangkum dalam table berikut.

Tabel 1. Nilai Maksimum, Nilai Minimum dan Range Pencapaian

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)		(2)		(3)	
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP U\$)	1.007.436 *(Rp)	107.721 (PPP U\$)	26.572.352 **(Rp)

* Batas maksimum minimum mengacu pada UNDP kecuali indikator pengeluaran

Keterangan:

- Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten Tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

- **Tahap Ketiga**, Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t = IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} = IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu juga dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu :

1. Kelompok “sangat tinggi” : $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi” : $70 \geq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang” : $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok “rendah” : $IPM < 60$

2.3 Tujuan Pembangunan Manusia

Pada tahun 2015, isu tentang pembangunan kembali menghangat. Di tahun ini, *Millenium Development Goals (MDGs)* memasuki batas tahun pencapaian. MDGs merupakan referensi penting pembangunan di Indonesia. Agenda MDGs akan dilanjutkan dengan mengembangkan konsep dalam konteks kerangka/ agenda pembangunan pasca 2015 yang disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Konsep SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015. Hal ini terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak 2000 mengenai isu berkurangnya (*depletion*) sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang semakin krusial, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin (Bappenas).

Terdapat tiga pilar utama yang menjadi indikator dalam pembentukan konsep pengembangan SDGs, yaitu :

1. Indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*human Development*) yaitu pendidikan dan kesehatan.

2. Indikator yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*) yaitu ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi.
3. Indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*) berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Berdasarkan ketiga pilar tersebut, dirincikan kembali kedalam 17 tujuan yang harus dicapai. Dalam 17 tujuan tersebut, terdapat beberapa target yang berhubungan dengan pembangunan manusia, yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan. Ketiga tujuan tersebut adalah:

1. Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk disegala usia. Salah satu targetnya (3b) yaitu mengakhiri kematian anak, kematian ibu, dan kematian akibat penyakit pada penduduk usia kurang dari 70 tahun. Jika dikaitkan dengan salah satu indikator pembentukan IPM, umur harapan hidup saat lahir secara tidak langsung akan menjadi salah satu indikator dari SDGs. Secara tidak langsung pula, umur harapan hidup saat lahir akan meningkat jika salah satu indikator SDGs yaitu angka kematian neonatal ditekan guna mencapai target tertentu.
2. Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Pada salah satu targetnya (4b), dinyatakan bahwa memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki masa kanak-

kanak secara dini yang berkualitas, juga pengasuhan dan pendidikan pradasar agar mereka siap untuk masuk ke pendidikan dasar. Pada target ini, diharapkan angka kelulusan baik SD, SMP, maupun SMA ditingkatkan. Secara langsung, ketika target ini dicapai maka angka rata-rata lama sekolah yang merupakan salah satu indikator penghitungan IPM akan ikut mengikat.

3. Tujuan Kedelapan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dalam target (8a), yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) minimal 7 persen per tahun di negara-negara berkembang. Salah satu indikator dari target ini adalah meningkatkan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Dengan meningkatnya PNB per kapita, secara tidak langsung akan menaikkan pengeluaran per kapita. Melalui SDGs, tujuan dan target pembangunan manusia terus diupayakan peningkatannya. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia dapat tercapai melalui pencapaian target SDGs.

BAB 3

GAMBARAN UMUM

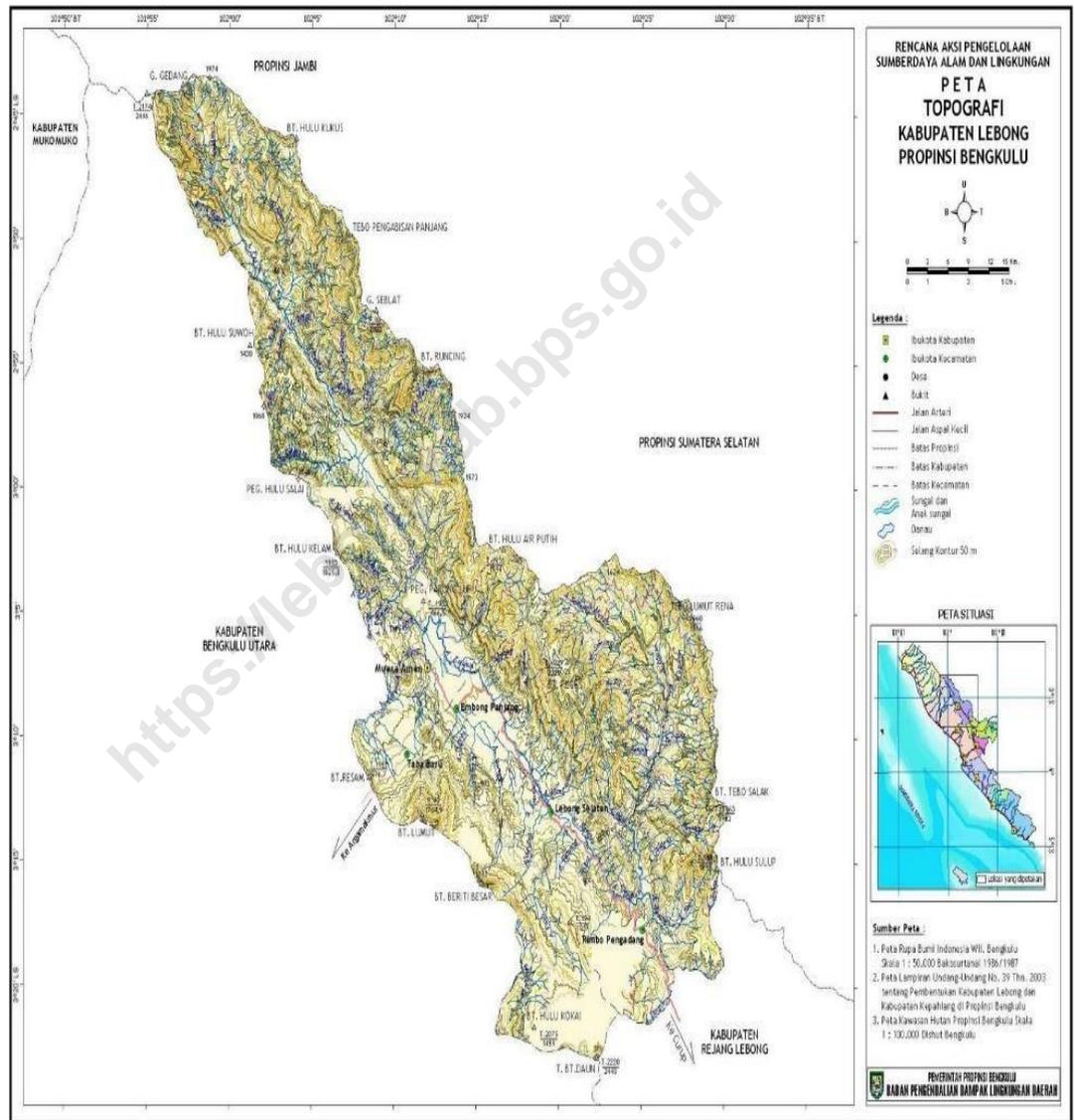
KABUPATEN LEBONG

3.1 Keadaan Geografis

Wilayah Kabupaten Lebong pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Rejang Lebong selaku kabupaten induk. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu, maka wilayah Kabupaten Lebong telah terpisah dari Kabupaten Induk Rejang Lebong. Kabupaten Lebong dengan topografi hamparan yang bervariasi, mulai dari lembah, bukit dan pegunungan dan diapit oleh pegunungan Bukit Barisan. Kabupaten Lebong berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan di sebelah timur, di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

Luas wilayah Kabupaten Lebong adalah 1.665,28 KM², yang terdiri dari 12 kecamatan yaitu Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Pelabai, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Amen, Kecamatan Uram Jaya dan Kecamatan Pinang Belapis. Kabupaten Lebong beribukota di Tubei di Kecamatan Lebong Atas sejak tahun 2003. Lebong Utara yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lebong ini juga merupakan pusat

perekonomian dari Kabupaten Lebong. Wilayah Kabupaten Lebong terbagi menjadi 93 desa dan 11 kelurahan. Topografi wilayah Kabupaten Lebong bervariasi, dari ketinggian 500 – 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl).



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Lebong

3.2 Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Lebong pada 2021 mencapai 106.293 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 54.393 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 51.900 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,8 jiwa.

Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu sebanyak 87.929 orang (LDA 2021) sedangkan dari jumlah tersebut yang merupakan angkatan kerja sebanyak 65.400 orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 22.529 orang. Dari jumlah tersebut penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kelamin di Kabupaten Lebong masih di dominasi oleh Laki-laki sebanyak 44.879 orang dan perempuan sebanyak 43.050 orang.

Tabel 2. Persentase Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki, 2021

Ijazah /STTB yang dimiliki	Persen (%)
Tidak Mempunyai Ijazah	19.17
SD/Sederajat	25,15
SMP/Sederajat	21.13
SMA ke atas	34.54

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lebong, 2021

3.3 Kesehatan

Kesehatan merupakan indikator penting karena termasuk salah satu ukuran yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk. Pentingnya kesehatan dan gizi tercermin dari Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam rangka tercapainya hidup sehat. Selanjutnya, tujuan utama di bidang kesehatan antara lain adalah penurunan angka kesakitan dan peningkatan status gizi penduduk. Peningkatan taraf kesehatan penduduk akan berdampak pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM inilah yang akan meningkatkan produktivitas penduduk yang bekerja.

a. Status Kesehatan

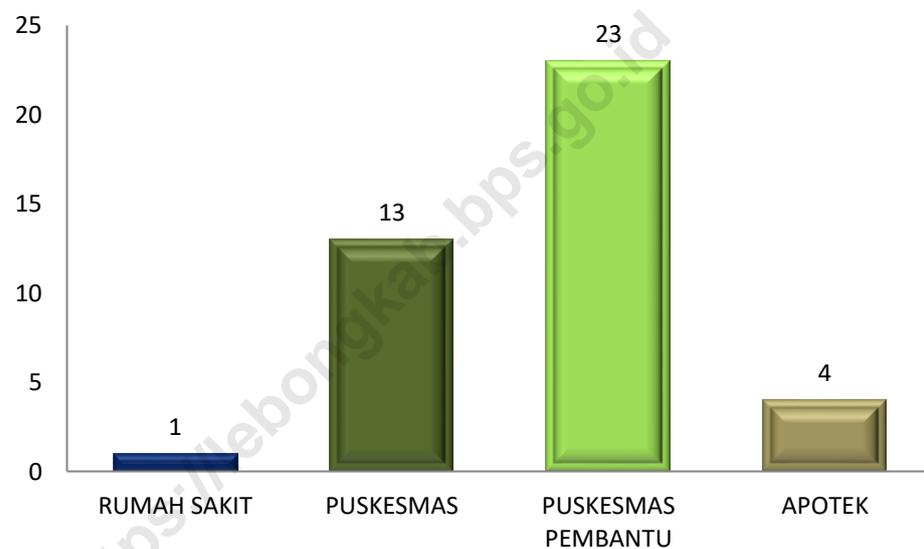
Persentase penduduk Kabupaten Lebong yang mempunyai keluhan kesehatan dan menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat jalan tahun 2021 adalah sebesar 17,67% (Statkesra 2021). Sedangkan persentase penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir (Angka Kesakitan) mencapai 13,69% (Statkesra 2021).

b. Akses Pada Fasilitas Kesehatan

Derajat kesehatan penduduk Lebong mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup. Umur harapan hidup Kabupaten Lebong pada Tahun 2021 sebesar 68,40 tahun. Jika

dibandingkan dengan umur harapan hidup (UHH) Tahun 2020, UHH Tahun 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan umur harapan hidup dapat menggambarkan kualitas kesehatan masyarakat yang semakin membaik.

Selanjutnya, untuk fasilitas kesehatan di Kabupaten Lebong pada Tahun 2021 yaitu terdapat 1 unit rumah sakit, 13 puskesmas, 23 puskesmas pembantu, dan 4 Apotek



Gambar 2. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kab. Lebong Tahun 2021

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan akses penduduk terhadap fasilitas kesehatan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang pernah berobat jalan ataupun mengobati sendiri. Dari total seluruh penduduk yang mengalami keluhan kesehatan 17,67 % berobat jalan menggunakan Jaminan Kesehatan dan sisanya 82.33 % mengobati sendiri. selama satu bulan terakhir menurut Data Susenas Maret 2021 Kabupaten Lebong. Besarnya persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan melakukan

pengobatan sendiri bisa disebabkan karena ketidakmampuan secara ekonomi untuk membiayai jasa kesehatan. Hal lain yang mendorong penduduk melakukan pengobatan sendiri bisa disebabkan karena penyakit yang diderita dianggap tidak tergolong berat sehingga cukup dengan membeli obat yang tersedia di warung atau toko obat. Merasa tidak perlu berobat ke tenaga kesehatan dengan penyakit yang diderita.

c. Fasilitas Perumahan dan Air Minum

Selain sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah, kondisi tempat tinggal juga menjadi salah satu indikator peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Jumlah Pelanggan Listrik rumah tangga di Kabupaten Lebong dengan sumber penerangan utama listrik PLN sebanyak 39.479.

Berdasarkan data Lebong Dalam Angka 2021, jumlah pelanggan PDAM sebanyak 6.422 pelanggan sedangkan air baku yang sudah disalurkan kepada pelanggan atau rumah tangga sebanyak 96.145 M³ sehingga masyarakat sudah menggunakan sumber air minum bersih. Dimana yang dimaksud dengan sumber air minum bersih adalah air minum yang berasal dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung, serta mata air terlindung dengan dengan jarak lebih dari 10 meter dari penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Sementara nilai pendapatan dari penyaluran air itu sebanyak Rp. 231.940.815,-. Dengan demikian masyarakat sudah menikmati air minum layak. Sumber air minum layak adalah sumber air minum yang

berasal dari leding, air hujan, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung, serta mata air terlindung dengan jarak lebih dari 10 meter dari penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Persentase sumber air minum yang digunakan rumah tangga berdasarkan hasil Susenas 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Persentase Sumber Air Utama yang digunakan Rumah Tangga untuk mandi, cuci dan lain-lain di Kabupaten Lebong, 2021

Sumber Air Minum	Persentase
Air Kemasan/ Isi Ulang	0
Leding	28,94
Sumur Bor/pompa	0,75
Sumur/Mata Air Terlindung	20,93
Sumur/Mata Air Tak Terlindung	38,31
Lainnya	11,07

Sumber: statistik Kesejahteraan Rakyat kabupaten Lebong, 2021

Kemudian untuk rumah tangga menurut jenis program perlindungan sosial yang diterima pada tahun 2021 rumah tangga yang menerima untuk bantuan pangan (BPNT/Program Sembako) 19,77 persen, Program Indonesia Pintar (PIP) 11,48 persen, Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/kKartu Keluarga Sejahtera (KKS) 9,87 persen dan program

Keluarga Harapan 11,76 persen (Susenas Maret 2021). Rincian Rumah tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang diterima dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang diterima Kab. Lebong, 2021

Jenis Program Perlindungan Sosial			Persentase Rumah Tangga yang menerima
Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako)			19,77
Program Indonesia Pintar (PIP)			11,48
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)			9,87
Program Keluarga Harapan (PKH)			11,76

Sumber: Statistika Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lebong, 2021

Menurut Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lebong Tahun 2021, persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan akhir tinja milik sendiri sebanyak 76,50 persen dan lainnya 23,50 persen. Hal ini menunjukkan mulai ada kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga sumber air tanah sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sendiri. Selain itu, hal ini juga mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang kebersihan. Selanjutnya untuk

tempat pembuangan akhir tinja yang digunakan oleh rumah tangga di Kab. Lebong Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Persentase Tempat Pembuangan Akhir Tinja yang Digunakan oleh Rumah tangga di Kab. Lebong, 2021

Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Persentase
Tangki Septik/IPAL/SPAL	27,40
Lainnya	72,60

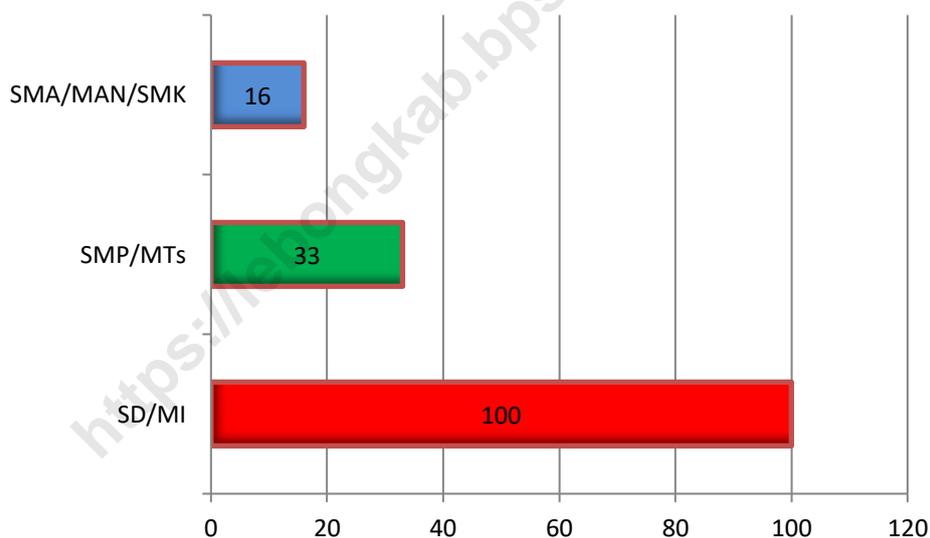
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lebong, 2021

3.4 Pendidikan

Keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor mendasar kemajuan suatu bangsa dan tidak semata-mata tergantung pada keunggulan sumber daya alam yang ada di negara tersebut. SDM yang bermutu dalam pengertian teknis, kemampuan, keahlian, keterampilan serta nilai-nilai modern lainnya tetap diperlukan dan akan menjadi prasyarat mutlak untuk dapat mencapai keunggulan bagi suatu bangsa. Pergeseran struktur masyarakat juga memiliki dampak mendasar dan berimplikasi terhadap terjadinya transisi kualifikasi SDM yang dibutuhkan. Pergeseran struktur masyarakat dari struktur tradisional ke struktur industri ditandai dari berkurangnya jenis pekerjaan pada sektor pertanian dan bertambahnya jenis pekerjaan pada sektor industri. Dalam beberapa tahun yang akan datang, jenis pekerjaan tradisional yang mengandalkan keterampilan motoris akan tergantikan oleh jenis pekerjaan yang berlandaskan pada otomatisasi dan

pengolahan informasi. Oleh karena itu, upaya memperbaiki profil pendidikan sudah merupakan suatu gejala universal. Pendidikan adalah suatu bentuk investasi yang produktif dan dipandang sebagai sarana untuk memasuki lingkungan kerja yang bersifat modern.

Untuk melihat sejauh mana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lebong sudah mencapai sasaran, dapat ditunjukkan melalui beberapa indikator. di antaranya adalah ketersediaan sekolah, tenaga pengajar, kemampuan baca tulis, serta jenjang pendidikan yang ditamatkan.



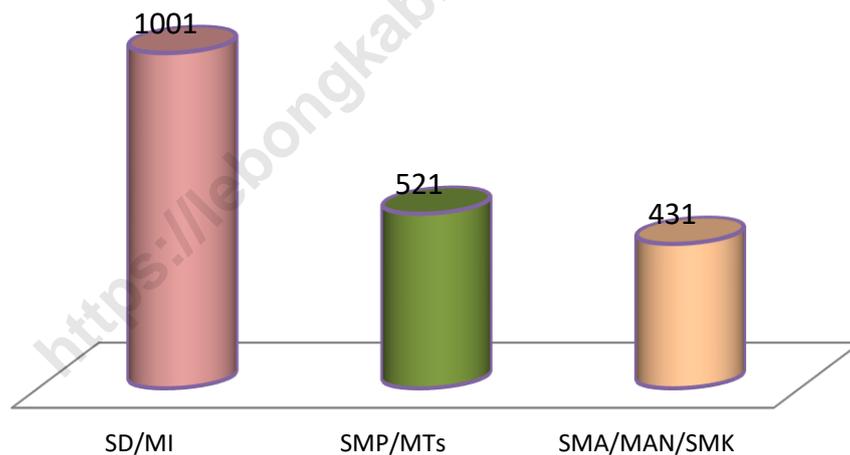
Gambar 3. Jumlah Sekolah di Kab. Lebong Tahun 2021/2022

Sumber : Kabupaten Lebong Dalam Angka 2022

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa jumlah sekolah menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Lebong pada 2022 adalah SD sebanyak 92 sekolah MI sebanyak 8 sekolah, SMP sebanyak 26 sekolah MTS terdapat 7 sekolah dan 6 sekolah untuk tingkat pendidikan SMA, MAN sebanyak 3 sekolah dan SMK sebanyak 7 sekolah. Keseluruhan sekolah tersebut tersebar

di semua kecamatan di wilayah Kabupaten Lebong. Keseluruhan sekolah yang tercantum ini merupakan sekolah yang terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

Selain melihat jumlah sekolah, ketersediaan tenaga pengajar juga harus diperhatikan karena kualitas siswa berhubungan positif dengan kualitas dan kuantitas guru. Penyebaran tenaga guru yang merata baik di daerah pedesaan maupun perkotaan juga akan mampu mengurangi kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan.



Gambar 4. Jumlah Tenaga Pengajar di Kab. Lebong Tahun 2021/2022

Sumber : Kabupaten Lebong Dalam Angka 2022

Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan minimal yang dibutuhkan penduduk untuk dapat menuju hidup yang lebih baik. Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin.

Tabel 6. Persentase Kemampuan Membaca dan Menulis Kab. Lebong, 2021

Kemampuan Membaca dan Menulis	Persentase	
	Laki-Laki	Perempuan
Huruf Latin	98,83	97,67
Huruf Lainnya	29,70	29,97

Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Lebong, 2021

Persentase penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Lebong bisa membaca dan menulis huruf latin sebesar 98,83% untuk penduduk laki-laki dan 97,67% untuk penduduk perempuan. Sedangkan persentase penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Lebong bisa membaca dan menulis huruf lainnya sebesar 29,70% untuk penduduk laki-laki dan 29,97% untuk penduduk perempuan. Dari data di atas juga dapat disimpulkan masih ada 1,17% penduduk laki-laki dan 2,33% penduduk perempuan yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin. Oleh karena itu, program pemerintah untuk semakin memperkecil jumlah penduduk yang buta huruf masih sangat diperlukan.

Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat pendidikan yang dicapai (ditamatkan) Kepala rumah Tangga yang pernah sekolah. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa persentase Kepala rumah Tangga Kabupaten Lebong berdasarkan

pendidikan yang ditamatkan pada 2021 paling banyak yang punya ijazah SMA ke atas sebesar 33,4%

Tabel 7. Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Lebong, 2021

Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	Persentase
Tidak Punya Ijazah SD	24,9
SD/ sederajat	27,4
SMP/ sederajat	14,3
SMA/ ke atas	33,4

Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)

3.5 Potensi Ekonomi

Pada 2022 perekonomian Kabupaten Lebong mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lebong atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha 2021 sebesar 3.627,26 milyar rupiah yang mengalami peningkatan dibandingkan PDRB tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3.346,03 milyar rupiah.

PDRB Kabupaten Lebong 2021 atas dasar harga berlaku masih didominasi oleh kode kategori lapangan usaha A yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 1.507,77 milyar rupiah. Meskipun kontribusi lapangan usaha ini masih dominan, namun jika dilihat dari tren yang ada tampak gejala penurunan kontribusi pertanian jika dibandingkan dengan Tahun 2020 turun sebesar 99,23 milyar rupiah. Sektor

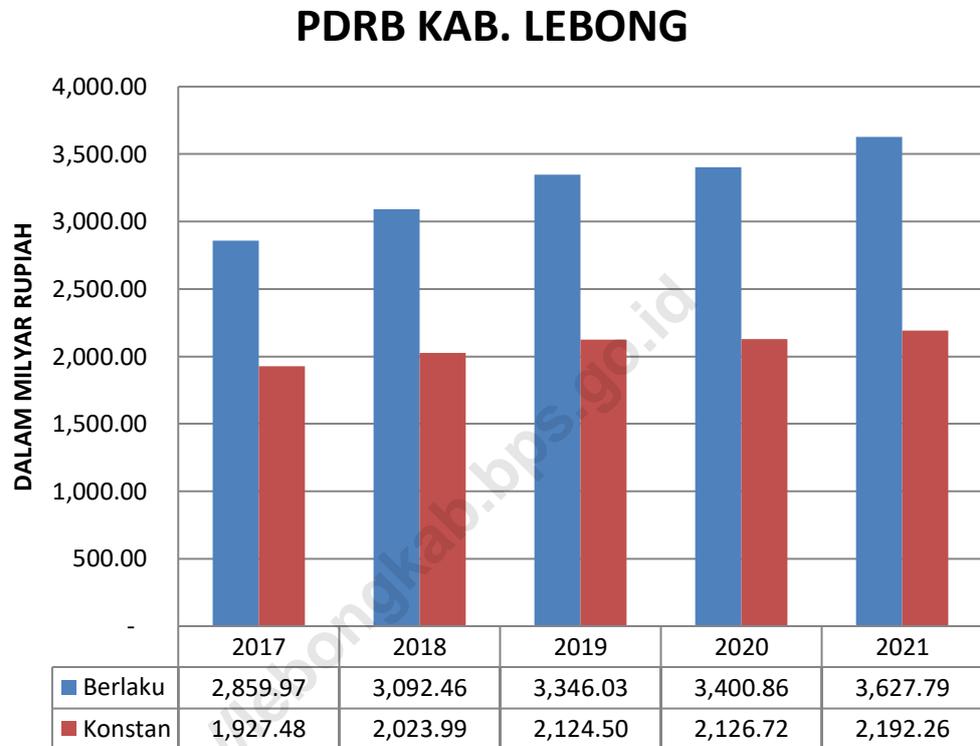
pertanian, kehutanan, dan perikanan ini memberikan kontribusi yang semakin berkurang dari kontribusi sektor dari tahun ke tahun.

Selanjutnya kontribusi lapangan usaha terbesar kedua di Kabupaten Lebong adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dengan share sebesar 414,80 milyar rupiah. Kontribusi dari sektor ini mengalami peningkatan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Pada 2017, kontribusi dari sektor ini hanya mencapai 323,39 milyar rupiah. Kontribusi sektor ini perlahan-lahan meningkat dari tahun ke tahun.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lebong pada 2021 masih mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun pada 2018 dan 2019. Namun sedikit mengalami peningkatan sebesar 3,08% dibandingkan dengan Tahun 2020 yang hanya mencapai 0,10%. Laju pertumbuhan ini berada pada angka 5,00% pada 2017 namun meningkat pada 2018 mencapai 5,01% dan pada 2019 sebesar 4,97% (angka sementara) dan pada 2020 sebesar 0,10% (angka sangat sementara)

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Lebong pada 2019 nilai tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,52%. Namun, jika dibandingkan dengan 2018 turun sebesar 2,16%. Laju pertumbuhan tertinggi kedua dicapai oleh Jasa Lainnya yang mencapai 8,74% naik sebesar 0,4% dibandingkan 2018. Sedangkan laju pertumbuhan untuk lapangan usaha

pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 3,35% naik sebesar 0,02% dibandingkan 2018.



Gambar 5. PDRB Kab. Lebong Tahun 2017-2021

BAB 4

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

KABUPATEN LEBONG

Pembangunan nasional Indonesia menempatkan manusia sebagai titik sentral sehingga mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam kerangka ini maka pembangunan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Untuk itu, pemerintah melakukan upaya meningkatkan kualitas penduduk sebagai suatu sumber daya.

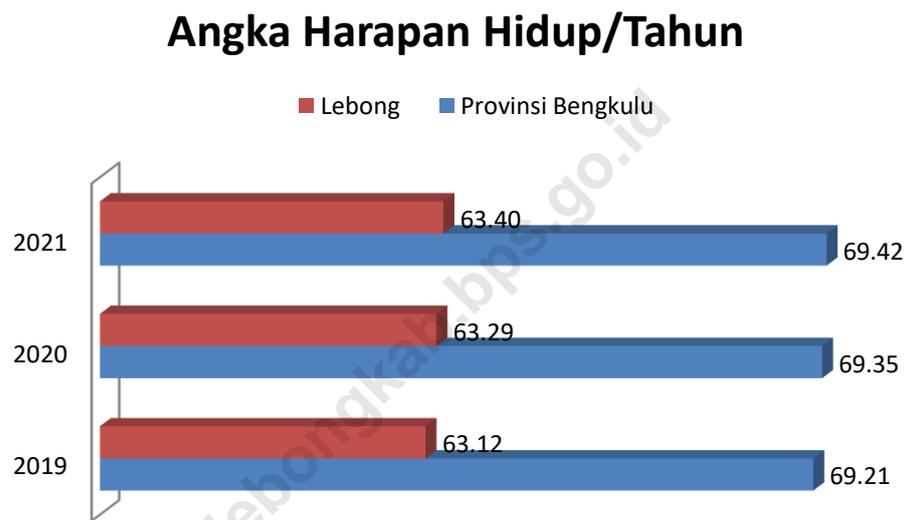
United Nations Development Programme (UNDP) melakukan pengukuran kinerja pembangunan manusia melalui suatu ukuran komposit yang diberi nama Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks tersebut memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan keterampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk hidup layak. Oleh karena itu, dalam perspektif pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, IPM tidak memasukkan aspek pembangunan moral dan penanaman budi luhur bangsa ke dalam sistem nilai yang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya alasan teknis yaitu sulit mengukur aspek tersebut dan formula penghitungan menjadi tidak sederhana. Namun demikian, dalam memberikan pengukuran tunggal dan sederhana dari upaya pembangunan, penggunaan indeks ini cukup memadai.

IPM merupakan indikator gabungan dari beberapa indikator yaitu indikator kesehatan, indikator pendidikan/pengetahuan, dan indikator pengeluaran. Indikator kesehatan tercermin dalam Indeks Harapan Hidup. indikator pendidikan/pengetahuan tercermin dalam Indeks Pendidikan dan indikator pengeluaran tercermin dalam Indeks Daya Beli. Ketiga indikator dasar tersebut dianggap dapat mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah.

4.1 Indeks Harapan Hidup

Perbandingan antar indikator komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tinjauan parsial. artinya tingkat pembangunan baru diukur dari satu komponen. Pada tahun 2021 umur harapan hidup (UHH) di Kabupaten Lebong adalah sebesar 63,40 tahun. Hal ini berarti rata-rata umur penduduk di Kabupaten Lebong yang lahir pada tahun 2021 sampai dengan meninggal adalah 63,40 tahun. UHH ini lebih rendah daripada umur harapan hidup penduduk Provinsi Bengkulu yang berada dikisaran 69,42 tahun. Namun demikian, umur harapan hidup penduduk Kabupaten Lebong pada tahun 2021 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 63,29 tahun. Umur harapan hidup ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Lebong telah memberi dampak positif pada perbaikan umur hipotesis yang semakin panjang.

Faktor lain yang memberikan sumbangan positif dalam peningkatan umur harapan hidup adalah kesadaran masyarakat dalam membudayakan pola hidup sehat. Pergeseran nilai budaya tradisional menuju hidup sehat yang lebih modern akan menentukan kemampuan mental dan fisik penduduk.

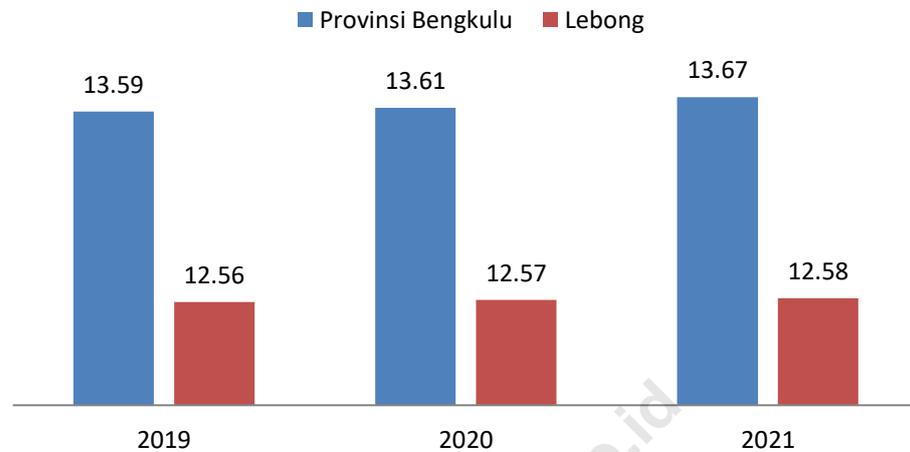


Gambar 6. Umur Harapan Hidup Kab. Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2021

4.2 Indeks Pendidikan

Harapan lama sekolah/HLS (expected years of schooling/EYS) Kabupaten Lebong pada Tahun 2021 adalah sebesar 8.18 tahun. Setiap tahunnya sejak 2019 hingga 2021 angka Harapan Lama Sekolah Kab. Lebong selalu meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

Rata-Rata Lama Sekolah/Tahun



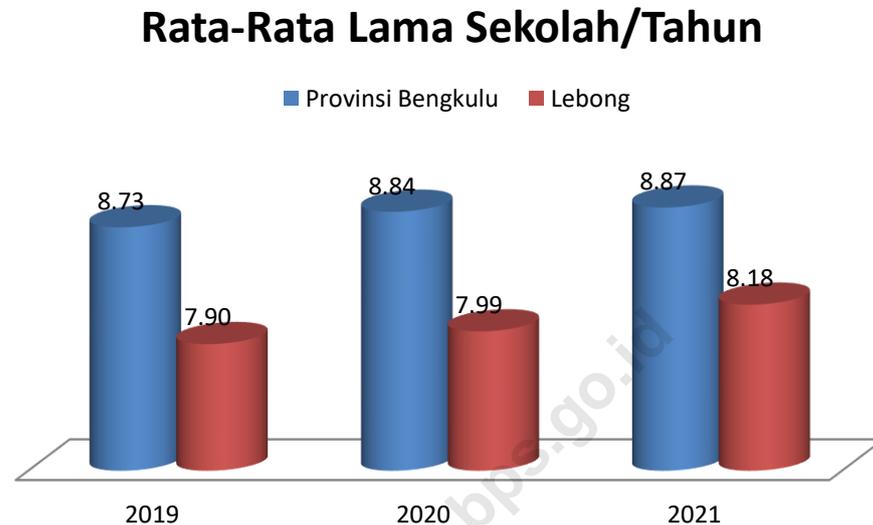
Gambar 7. Angka Harapan Lama Sekolah Kab.Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2021

Pada Tahun 2021, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Lebong lebih rendah dibandingkan HLS Provinsi Bengkulu. Namun, perkembangan HLS setiap tahun di Kabupaten Lebong dan Provinsi Bengkulu menunjukkan peningkatan.

Sedangkan Angka rata-rata lama sekolah/RLS (*Mean years of schooling/MYS*) di Kabupaten Lebong mengalami peningkatan dari 7,90 tahun Pada 2019 menjadi 8.18 tahun pada 2021. Angka ini menggambarkan bahwa rata-rata penduduk Lebong bersekolah selama 7 sampai 8 tahun. Dengan angka rata-rata lama sekolah ini menunjukkan sumber daya manusia di Kabupaten Lebong masih tergolong rendah dan dibawah program wajib belajar 12 tahun dari pemerintah.

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Lebong lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu yang mencapai 8.87 tahun pada 2021. Data angka rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten

Lebong dan Provinsi Bengkulu 3 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.



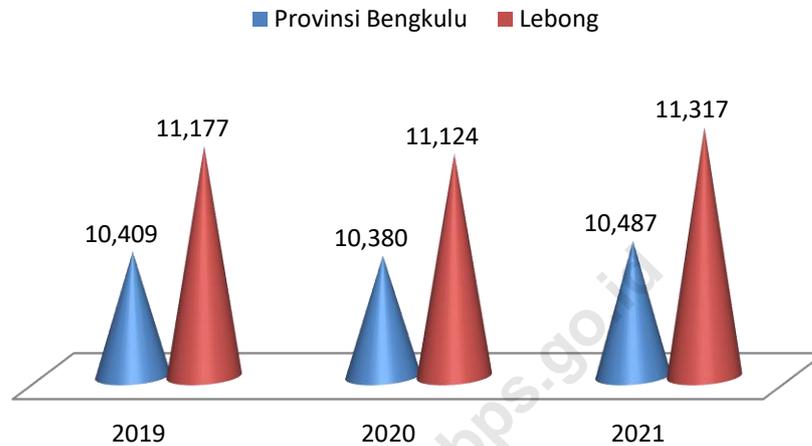
Gambar 8. Rata-Rata Lama Sekolah di Kab. Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2021

4.3 Indeks Daya Beli

Komponen paritas daya beli yang dikenal dengan komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil perkapita yang disesuaikan (UNDP menggunakan indikator PDB perkapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara). Besaran nilai Indeks Daya Beli menunjukkan tingkat kemampuan daya beli penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilai Indeks Daya Beli mengindikasikan tingkat

kesejahteraan penduduk yang semakin baik.

Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)



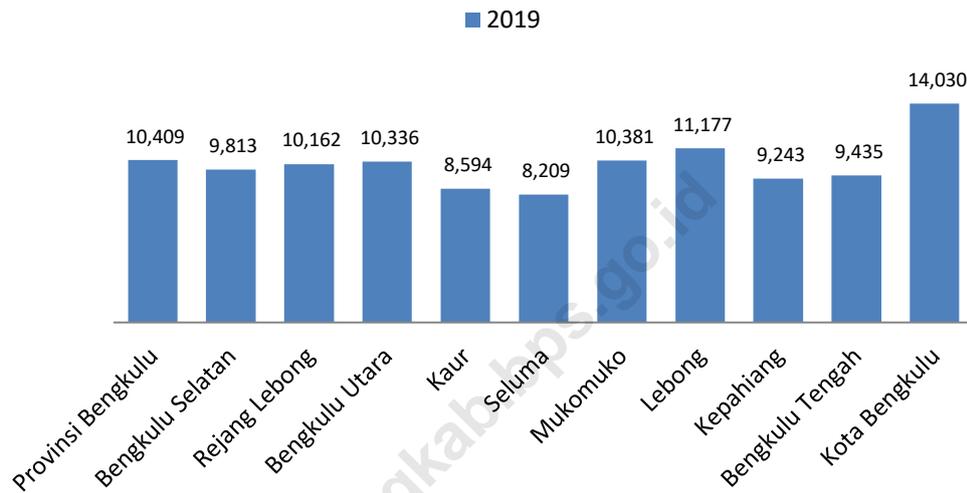
Gambar 9. Pengeluaran per kapita Kab. Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2021

Daya beli penduduk Kabupaten Lebong yang dicerminkan oleh besaran pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan menurun dari 11.177 juta menjadi 11.124 juta rupiah dan mulai naik kembali pada 2021 menjadi 11,317 juta rupiah. Bila diperhatikan pola yang terjadi dari 2019 besaran tersebut menunjukkan adanya kecenderungan Peningkatan kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Lebong. Bila dibandingkan rata-rata pengeluaran per kapita Provinsi Bengkulu yang mempunyai besaran pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan pada angka 10.487 juta rupiah maka kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Lebong berada atas rata-rata Provinsi Bengkulu.

Kemudian jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita Kabupaten/Kota lainnya se-Provinsi Bengkulu Tahun 2021, Kab. Lebong

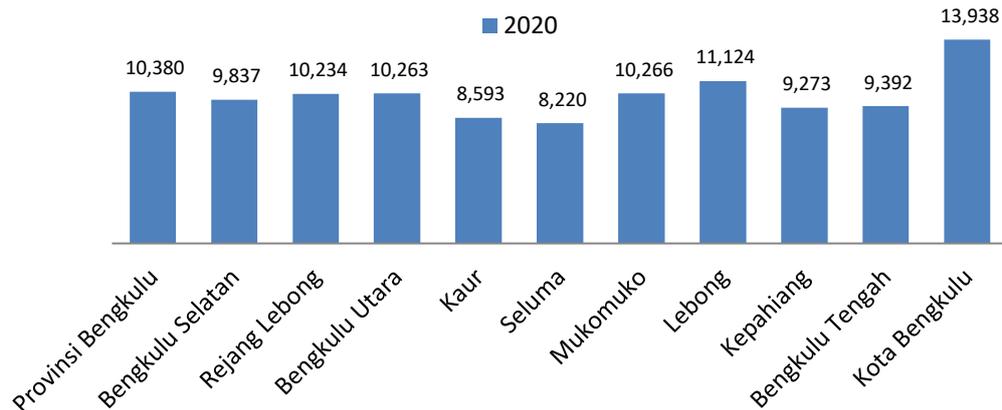
berada di posisi teratas dan dibawah Kab.Lebong yaitu Kab. Mukomuko. seperti yang disajikan pada grafik di bawah ini.

Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (ribu Rupiah)



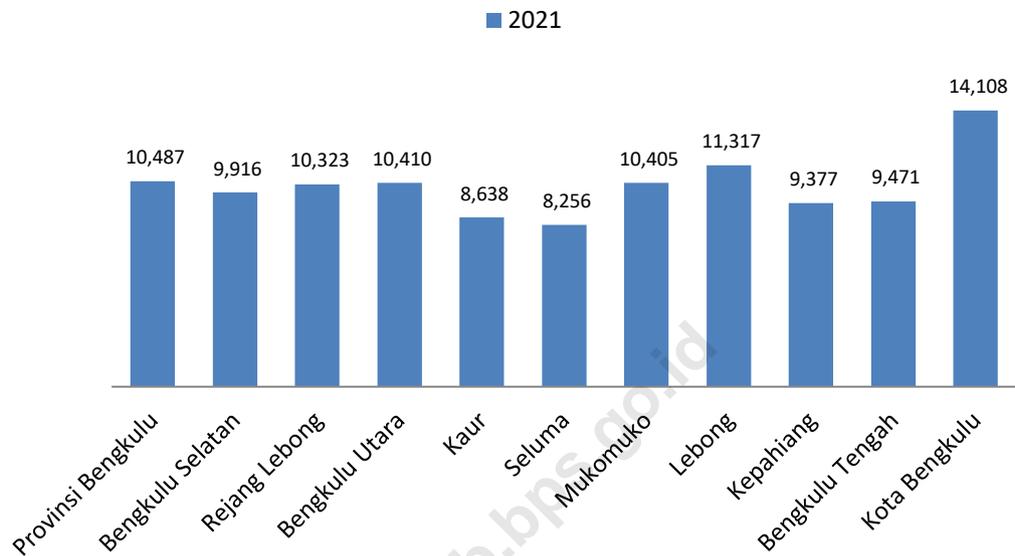
Gambar 10. Pengeluaran per Kapita Kab/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2019

Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (ribu Rupiah)



Gambar 11. Pengeluaran per Kapita Kab/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020

Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (ribu Rupiah)



Gambar 12. Pengeluaran per Kapita Kab/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2021

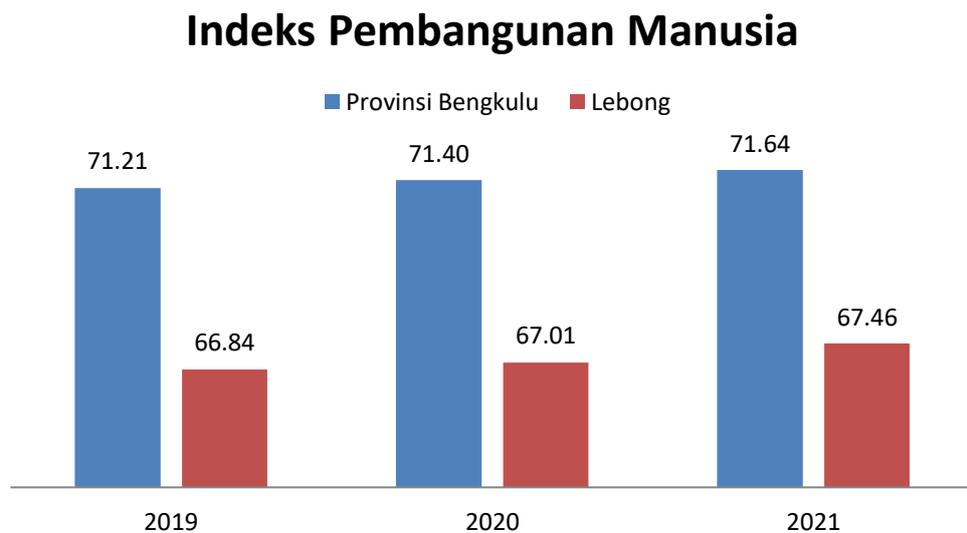
4.4 Indeks Pembangunan Manusia

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah memperlihatkan progres/perkembangan suatu wilayah bukan dilihat berdasarkan ranking. Bagi suatu wilayah, angka IPM menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah dan merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik.

Menurut skala internasional angka IPM Kabupaten Lebong termasuk dalam kategori kesejahteraan Sedang. Hal tersebut sama dibandingkan dengan Tahun 2020 dimana IPM Kab. Lebong masih terkategori kesejahteraan sedang. Nilai IPM Kabupaten Lebong Tahun

2021 adalah 67,46. Angka ini mengalami peningkatan sepanjang tahun 2019 sampai 2021. Demikian juga dengan nilai IPM Provinsi Bengkulu sejak tahun 2020 hingga 2021 termasuk dalam kategori kesejahteraan tinggi. Hal ini tercermin dari angka IPM Provinsi Bengkulu sebesar 71,40 pada 2020 dan 71,64 pada 2021.

Dibandingkan tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Lebong 2021 Meningkat sebesar 0,45 poin dari 67,01 menjadi 67,46. Sedangkan pertumbuhan IPM untuk Provinsi Bengkulu meningkat sebesar 0,24 poin dibandingkan dengan tahun 2020. Meski demikian pertumbuhan ini adalah suatu bentuk capaian yang mengarah ke arah maksimal. Dan ke depannya diharapkan angka pertumbuhan IPM ini dapat terus meningkat. Nilai IPM Kab. Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2021 disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 13. IPM Kab. Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2021

4.5 Perbandingan IPM Antar Kabupaten/Kota

Jika dilihat dari capaian IPM antar kabupaten/kota pada Tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebong berada pada peringkat delapan dari sepuluh kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Angka IPM tertinggi adalah di Kota Bengkulu yang diikuti oleh Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sedangkan menurut Berita Resmi Statistik tentang IPM Tahun 2021 menyatakan Provinsi Bengkulu dengan angka IPM sebesar 71,64 menempati peringkat ke-7 dari seluruh sepuluh provinsi di Sumatera pada Tahun 2021.

Tabel 8. Nilai dan Peringkat IPM Kab/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2021

Kabupaten/Kota	IPM		Peringkat IPM	
	2020	2021	2020	2021
BENGKULU	71,40	71,64	18	18
Bengkulu Selatan	70,63	70,75	2	2
Rejang Lebong	70,44	70,77	3	3
Bengkulu Utara	68,82	69,28	4	4
Kaur	66,99	67,17	9	9
Seluma	66,89	67,03	10	10
Mukomuko	68,45	68,64	5	5
Lebong	67,01	67,46	8	8
Kepahiang	68,17	68,62	6	6
Bengkulu Tengah	67,61	67,96	7	7
Kota Bengkulu	80,36	80,54	1	1

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2021

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Lebong dari Tahun 2019 hingga 2021 meningkat. Hal ini tercermin dari besaran angka IPM Kabupaten Lebong yang semakin besar dari tahun ke tahun, kondisi nilai IPM terakhir yaitu nilai IPM Tahun 2021 adalah 67,46. Kenaikan angka IPM ini seiring dengan kenaikan seluruh komponen pembentuk IPM yaitu angka harapan hidup sebesar 63,40 dengan harapan lama sekolah sebesar 12,58 tahun. Rata-rata lama sekolah sebesar 8.18 tahun dan pengeluaran perkapita disesuaikan sebesar 11.317 juta rupiah.

Kabupaten Lebong berada pada peringkat ke delapan dari sepuluh kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Angka IPM tertinggi adalah di Kota Bengkulu yaitu sebesar 80,54 yang diikuti oleh Kabupaten Bengkulu Selatan dengan angka IPM sebesar 70,75. Nilai IPM Kabupaten Lebong pada tahun 2021 termasuk ke dalam kategori kesejahteraan sedang. Sedangkan halnya dengan IPM Provinsi Bengkulu termasuk kategori kesejahteraan tinggi. Untuk itu, diharapkan agar angka IPM ini dapat menjadi indikator penting dalam mengevaluasi jalannya pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebong.

5.2 Implikasi Kebijakan

Dari pemahaman hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan komponen-komponennya, dapat dirancang program peningkatan kesejahteraan penduduk melalui upaya peningkatan kesehatan dan peningkatan pendidikan penduduk secara umum. Sementara itu, upaya peningkatan daya beli penduduk dapat merupakan dampak berantai dari upaya peningkatan kesehatan dan pendidikan penduduk.

Upaya peningkatan kesehatan penduduk dapat dilakukan di antaranya melalui:

- ✓ Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara hidup sehat, berupa upaya pencegahan dan upaya pengobatan baik tradisional maupun modern.
- ✓ Meningkatkan ketersediaan obat-obatan modern yang terjangkau oleh masyarakat.
- ✓ Meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan terutama berupa revitalisasi Posyandu dan layanan Puskesmas baik keliling maupun biasa.
- ✓ Menggalakkan program-program yang mampu menekan angka kematian bayi dan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.
- ✓ Memperbaiki mutu lingkungan hidup atau pemukiman sekaligus menanamkan kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan pemukiman untuk mengurangi penyebaran penyakit.

Di sisi lain, upaya peningkatan pendidikan masyarakat dapat juga dilakukan antara lain dengan:

- ✓ Penajaman sasaran wajib belajar melalui berbagai jalur.

- ✓ Penyediaan dan penyebaran guru berdedikasi dan berkualitas perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah karena guru merupakan tulang punggung bagi pembentukan pelajar yang berkualitas.
- ✓ Adanya peningkatan sarana dan prasarana transportasi sebagai penunjang akses masyarakat dalam menjangkau pendidikan formal.

Di bidang ekonomi, perbaikan daya beli masyarakat tidak terlepas dari peningkatan pendapatan. Secara berkesinambungan. jika terjadi peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan. berarti juga telah terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga diharapkan terciptanya generasi-generasi yang siap bersaing di era globalisasi. Selain itu, peningkatan pendapatan juga tidak terlepas dari berkembangnya dunia usaha dan semakin baiknya iklim investasi untuk menciptakan peluang-peluang usaha. Untuk itu, hendaknya pemerintah Kabupaten Lebong mampu menjadi pemicu berkembangnya perekonomian daerah dengan menghidupkan dunia usaha pada berbagai sektor ekonomi dengan melihat potensi daerah yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2021. *Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- BPS Kabupaten Lebong . 2022. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Lebong 2021*.
Tubei: BPS Kabupaten Lebong
- BPS Kabupaten Lebong . 2022. *Lebong dalam Angka 2022*. Tubei: BPS
Kabupaten Lebong
- BPS Kabupaten Lebong. 2022. *Raw data Susenas 2021*. Bengkulu: BPS Provinsi
Bengkulu

D A T A
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LEBONG**

Kompleks Perkantoran Dua Jalur Lebong

Telepon : (0738) 2200032

Website lebongkab.bps.go.id; email : bps1707@bps.go.id